

246.04
Wij
u

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA
BANK PEMERINTAH DENGAN NASABAH DEBITUR DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S – 2**

Program Studi Magister Kenotariatan

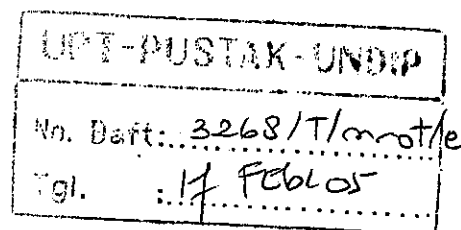
**I Nyoman Wijaya
B4B002104**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
OKTOBER
2004**

TESIS

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN NASABAH DEBITUR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :
I NYOMAN WIJAYA
B4B002104



Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 5 Oktober 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama

ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum
NIP. 130606004

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Prof. IGN. SUGANGGA, S.H
NIP. 130359063

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2004

Penulis,

I Nyoman Wijaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : I Nyoman Wijaya, SH.

Alamat : Jl. Pantai Kuta No. 41, Kuta – Bali.

Tempat / Tanggal Lahir : Kuta, 24 Mei 1977

Agama : Hindu

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri No. 5 Kuta
(dari tahun 1983 – 1989)
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sunari Loka
Kuta
(dari tahun 1989 – 1992)
- Sekolah Lanjutan Umum Atas Saraswati I Denpasar
(dari tahun 1992 – 1995)
- Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar
(dari tahun 1995 – 2002)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ANTARA BANK PEMERINTAH DENGAN NASABAH DEBITUR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberi dorongan pada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Achmad Busro, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberi bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, salah satu faktor terwujudnya tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan Bapak Prof. Dr. Suhajo Hadisaputro, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Achmad Busro, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H dan Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Serta para guru besar dan staf pengajar yang selama ini telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H., Bapak Achmad Busro, S.H., M.Hum, Bapak Erry Agus Priyono, S.H., M.Hum, Bapak H.A. Tulus Sartono S.H., Ms, Bapak Suradi, S.H., M.Hum sebagai Tim Penguji tesis ini.
5. PT. Bank Mandiri (persero) Tbk melalui Bapak Tri Mulyo Harsono (Credit Loan Officer)

PT. Bank Tabungan Negara (persero) melalui Sri Purwanto (Asisten Branch Manager)

Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Legian Denpasar Bali melalui Bapak Gede Arimbawa (Marketing)

Terima kasih atas informasi yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bali – Denpasar melalui Bapak Dewa Gede Rudy, S.H., M.H., dan Bapak A.A. Darmadipta, terima kasih atas semua bantuan baik informasi dan data-data yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Nyoman Sugiharta, S.H., dan I Gusti Ngurah Mahabuana, S.H., Notaris Kotamadya Denpasar, yang telah membantu dalam kelancaran tesis ini.

8. Bapak I Gede Suwastika, Bapak Ida Bagus Adnyana Putra, nasabah PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, Bapak I Ketut Westra, dan Ibu Nyoman Sukerti nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Legian Denpasar. Terima kasih atas keterangannya selama penulis melakukan penelitian.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku atas segala bantuan dukungan dan doanya selama menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Terakhir kupersembahkan buat Yanti, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, serta dorongan semangat untuk menapak masa depan, hanya satu kata saya ucapkan untukmu "You are my real love"

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu semua kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dengan tersusunnya tesis ini dapat memberi manfaat bagi disiplin ilmu hukum khususnya mengenai hukum perjanjian.

Semarang, Oktober 2004

Penulis,

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| RIWAYAT HIDUP | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| INTISARI | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1. Keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian | 8 |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian | 8 |
| 2.1.2. Syarat sahnya suatu perjanjian | 10 |
| 2.1.3. Kekuatan mengikat perjanjian | 12 |
| 2.2. Perjanjian Kredit Bank sebagai perjanjian baku dalam Praktek Perbankan | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.1. Pengertian dan Fungsi Perjanjian Kredit | 14 |
| 2.2.2. Pengertian dan karakteristik perjanjian baku | 17 |
| 2.2.3. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian baku | 19 |
| 2.2.4. Pengaturan perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1. Metode Pendekatan | 26 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 26 |
| 3.3. Populasi dan Metode Sampling | 27 |
| 3.4. Lokasi Penelitian | 28 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 3.6. Teknik Analisis Data | 30 |
| BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 4.1. Azas Konsualisme Sebagai Dasar Pembentukan Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah Debitur | 31 |
| 4.2. Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank Sehubungan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen | 45 |
| 4.3. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen | 61 |

| | | |
|-------------------|-------------------|----|
| BAB V | PENUTUP | 69 |
| 5.1. | Kesimpulan | 69 |
| 5.2. | Saran-Saran | 71 |
| BAB IV | RINGKASAN | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

INTISARI

Penelitian ini diselenggarakan untuk mengetahui beberapa hal, pertama; untuk mengetahui apakah perjanjian kredit antara nasabah debitur dan bank pemerintah di kota Denpasar dibentuk atas dasar konsesualisme. Kedua; untuk mengetahui apakah rumusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat pemerintah sudah memenuhi pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga; untuk mengetahui apa akibat hukumnya perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula baku tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang diselenggarakan ini adalah termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan atau mengutamakan data primer atau data lapangan. Disamping itu, guna melengkapi data primer dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank pemerintah dibentuk atas dasar kesepakatan (konsesualisme). Begitu juga tentang rumusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat bank pemerintah belum memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian selanjutnya, akibat hukum perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula baku tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum (Null and Void). Dalam hal demikian secara yuridis dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian antara pihak-pihak dan perjanjian kredit yang demikian itu menuntut hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Namun secara praktek dilapangan selama penelitian belum ada nasabah debitur yang merasa keberatan terhadap keberadaan klausula baku tersebut, ini berarti nasabah debitur menerima akan keberadaan klausula-klausula baku tersebut khususnya peningkatan suku bunga maka dengan demikian ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g tersebut perlu dipertimbangkan lagi.

ABSTRACT

This research has been done for knowing some subjects, first; whether the credit agreement between the debtor client and the government bank in Denpasar city is formed based on the consensus. The second; to know whether the formula of standard clause in the government credit agreement has already fulfilled the Consumer Protection Act section 18. Third; to know whether the law consequences of bank credit agreement grafts the standard clause that is not fulfilled the restriction of Consumer Protection Regulations section 18.

This research involves in the empiric research that focuses or gives priority on the primary data or field data. In addition, the literature research is also done for completing the primary data by giving the secondary data as complement.

The research result shows that the credit agreement between the debtor client and the government bank is formed based on the agreement. It also shows the formula of standard clause on the government bank credit agreement has not fulfilled the restriction of Consumer Protection Regulations section 18 subparagraph (1) on g character. Moreover, the bank credit agreement law consequences that includes the standard clause which is not appropriate to or not fulfilled in the restriction of Consumer Regulations section 18 subparagraph (1) on g character is Null and Void. Therefore, juridically from the beginning there is no agreement between the parties and that such credit agreement. It has not a power to tie the claim of law consequences.

However, practically, during this research there is no debtor client who has objection towards the existences of the standard clause. It means that the client accepts that standard clause existences especially the increasing of bank interest. Thus, the restriction of that regulations also can be considered.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, fungsi konvensional dari bank adalah disamping menghimpun dana dari masyarakat, juga memberi pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat.

Kredit itu sendiri menurut UU. Perbankan (Pasal 1 angka 11) diberikan arti sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan begitu kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lain/nasabah didasarkan pada perjanjian yang namanya perjanjian kredit. Oleh karenanya jelas, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang yang melibatkan bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman disebut perjanjian kredit.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.¹ Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.² Disamping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam UU Perbankan. Yang disoroti dalam perjanjian baku adalah mengenai sifatnya (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausula).³ Perjanjian baku dalam praktek bisnis sudah bukan merupakan hal baru lagi. Praktek penggunaan perjanjian baku pada masa kini, yang menuntut gerak

¹ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan I, Alumni, Bandung dari hal. 146.

² Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hal 58

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, hal. 112-113.

langkah hidup yang cepat, rupanya tidak dapat dibendung, bahkan ada yang meramalkan penggunaan perjanjian baku cenderung akan meningkat, meskipun disana sini ada keluhan atau rasa tidak puas dari berbagai kalangan, terutama masyarakat (konsumen).

Didalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) itu isinya tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya. Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya sebagai berikut :

“Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis, dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit”.

Klausula perjanjian kredit sebagaimana diatas jelas-jelas tidak seimbang, dan merugikan nasabah bank. Suatu perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Posisi nasabah demikian lemah dibandingkan dengan pihak

bank. Terhadap adanya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga sebagaimana disampaikan dalam contoh klausula perjanjian kredit diatas sudah semestinya mendapat persetujuan kedua belah pihak. Apa yang diuraikan diatas tersebut hanyalah salah satu contoh kecil saja. Masih banyak jenis klausul perjanjian kredit yang model demikian tersebar di masyarakat. Perjanjian baku tidak hanya terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi juga dalam perjanjian-perjanjian yang lain, misalnya perjanjian angkutan laut, udara, perjanjian asuransi dan lain-lainnya.⁴

Fenomena perjanjian kredit dengan klausula bakunya menimbulkan persoalan hukum baru dengan diberlakukannya U.U. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 18 dari U.U Perlindungan Konsumen mengatur tentang ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁵

UU. Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) dalam Bab V Pasal 18 mengatur antara lain bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, Alumni Bandung hal 32

⁵ Rudi Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO Bandung, 2000 hal 7

mencantumkan klausula baku. Pada setiap dokumen dan/atau perjanjian bila (diantaranya) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen tersebut, maka membawa implikasi hukum terhadap eksistensi dari perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku. Faktanya di masyarakat, masih banyak perjanjian baku, terutama perjanjian kredit bank yang dibuat tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen. Masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku pada perjanjian kredit yang sulit dimengerti dan bahkan ada klausula yang secara nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemerintah di Kota Denpasar dibentuk atas dasar konsensualisme ?

2. Apakah rumusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat oleh bank pemerintah sudah memenuhi ketentuan Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen?
3. Apakah akibat hukum perjanjian kredit bank yang menentukan klausula baku tidak memenuhi ketentuan pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang konsensualisme pembentukan perjanjian kredit antara nasabah debitur dan bank pemerintah di Denpasar.
2. Untuk mengetahui rumusan klausula baku perjanjian kredit yang dibuat bank pemerintah dihubungkan Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian kredit yang mencantumkan klausula baku tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perjanjian pada khususnya.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka mempersiapkan pembuatan Undang-Undang Perjanjian yang bersifat nasional, yang nantinya juga mengatur tentang perjanjian baku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Di dalam memberikan pengertian atau batasan tentang perjanjian pada umumnya, ada berbagai macam pendapat dari para sarjana atau kalangan para ahli hukum. Pendapat para ahli tersebut berbeda-beda satu sama lainnya, meskipun dalam beberapa hal mengandung kesamaan. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum adalah wajar, karena adanya perbedaan latar belakang pola pikir ataupun pandangan hidup yang dianutnya.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dikatakan terlalu luas, karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai perjanjian kawin.¹

¹ Marian Darus Badruzaman, *KUH. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Cetakan I, Edisi Kedua, Alumni Bandung, 1996, h. 89.

Sri Soedewi Masychoen Sofwan mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain.² Kemudian R.Subekti memberikan arti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Sedangkan Abdulkadir Muhamad memberikan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴

Dari berbagai macam pengertian perjanjian yang diberikan oleh para sarjana tersebut, pada intinya yang bersangkutan ada keinginan yang hakiki untuk menciptakan suatu pengertian perjanjian yang sempurna, namun sudut pandang dari para sarjana adalah didasarkan atas visi mereka masing-masing serta kapasitasnya sebagai seorang sarjana mengandung kualitas yang berbeda-beda, dan kesempurnaan itu

² A. Qirom Syamsudin Meilualala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 7.

³ R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Cetakan IX, Citra, Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 58.

⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1992, hal. 78.

akan ada manakala ada saling melengkapi antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

2.1.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek perbuatan hukum yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan kata sepakat pada syarat pertama adalah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju dan seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁵ Kemudian yang dimaksud dengan cakap pada syarat

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 17.

kedua, adalah dimana orang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, cakap menurut hukum.⁶

Selanjutnya untuk suatu hal tertentu pada syarat ketiga, mengandung arti bahwa obyek perjanjian itu harus jelas, atau mempunyai obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Obyek tertentu dapat berupa benda yang sudah ada maupun baru yang akan ada.⁷ Sedangkan suatu kausa yang halal dalam syarat keempat mengandung arti bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan atau melanggar sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1335 KUH. Perdata, bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Keempat syarat diatas harus dipenuhi, agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum. Apabila salah satu dari syarat subyektif tidak terpenuhi, maka terhadap perjanjian itu dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui

⁶ *Ibid*

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal 108

perantaraan Hakim. Perjanjian dimaksud tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang berhak atas pembatalan itu. Apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada suatu perikatan (*Nul and Void*). Tujuan para pihak untuk melahirkan perikatan adalah gagal, sehingga dengan demikian para pihak tidak dapat saling menuntut di depan Hakim.

2.1.3. Kekuatan Mengikat Perjanjian

Didalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa azas, yaitu :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij autonomie*)
2. Asas kensensualisme (persesuaian kehendak)
3. Asas kepercayaan
4. Asas kekuatan mengikat
5. Asas persamaan hukum
6. Asas keseimbangan
7. Asas kepastian hukum
8. Asas moral
9. Asas kepatutan
10. Asas kebiasaan

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak. Hal ini merupakan salah satu azas dalam hukum perjanjian. Berbicara tentang kekuatan mengikat perjanjian, maka Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH. Perdata sangat relevan keberadaannya. Menurut Pasal 1338

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa dengan istilah "Semua" itu terkandung azas yang dikenal dengan azas *partij autonomie*. Dengan istilah "secara sah", pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah. Marian Darus Badruzaman menegaskan bahwa yang dimaksud secara sah disini ialah bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata harus terpenuhi. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak seperti halnya undang-undang.⁸

Dengan dasar azas kebebasan berkontrak, para pihak dalam perjanjian bebas dan berhak untuk menentukan apa-apa saja yang diinginkannya dan sekaligus juga diperkenankan untuk menentukan apa-apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjiannya, dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUH. Perdata).⁹

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op cit*, hal 107

⁹ Felix O Soebagio, *Perkembangan Azas-azas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 tahun terakhir, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta 18 dan 19 Pebruari, 1993, Hal. 6.

2.2. Perjanjian Kredit Bank Sebagai perjanjian baku Dalam Praktek Perbankan

2.2.1. Pengertian dan Fungsi Perjanjian Kredit.

Seperti diketahui, fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undnag-undang Perbankan (Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998) tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut. Menurut Rachmadi Usman :

Bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak lain nasabah. Peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰

Sentosa Sembiring sebagai pengamat dan pengajar Hukum Perbankan juga berpendapat bahwa UU Perbankan tidak mencantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun meskipun demikian, dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dan nasabah (kreditur dan debitur)¹¹

Kebanyakan para pakar dan pemerhati hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakekatnya adalah

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 360.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 67

perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur didalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selengkapnya berbunyi :

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, R. Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1754 - Pasal 1759).¹² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam bank dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan :

Dari rumusan yang terdapat didalam UU Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam seperti diatur Pasal 1754 KUH Perdata.

¹² R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 3

¹³ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975, h. 67.

Perjanjian pinjam meminjam ini mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika "*verbruiklening*" termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjam. Oleh karena itu perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh bank kepada nasabah.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pemberian kredit oleh bank kepada nasabah wajib dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notaries. Hal mana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perjanjian kredit itu berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, h. 7-8.

Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring kredit¹⁵

2.2.2. Pengertian dan karakteristik Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku adalah merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*Standard contract*". Dalam hal ini, Mariam Darus Badruzaman menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku. Baku berarti patokan, acuan, jadi perjanjian baku menurut definisi beliau adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁶

Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep-konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.¹⁷

Sudaryatmo menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai karakteristik sebagai berikut :

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, h. 228.

¹⁶ *Op.Cit.*, Hal 48

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Loc cit*

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.¹⁸

Ciri-ciri kehidupan masyarakat yang modern ditandai dengan adanya kecenderungan mendapatkan pelayanan jasa secara praktis, efisien, dan efektif.¹⁹⁾ Sejalan dengan cerminan kehidupan masyarakat modern itu, pelaksanaan perjanjian jual beli, pelayanan kredit oleh pihak bank, atau pembeli polis asuransi, telah dilingkupi berbagai perjanjian baku.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya hanya menguntungkan si pembuatnya (produsen/pengusaha) dan merugikan konsumen, karena isinya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar, karena yang bersangkutan mempunyai posisi yang lebih kuat bila dibandingkan dengan konsumen. Konsumen hanya menerima begitu saja syarat-syarat baku karena dorongan kepentingan kebutuhan.

Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian baku, serta tidak berdaya untuk menolaknya. Seperti ditegaskan oleh Pitlo bahwa perjanjian baku itu sebagai perjanjian paksa (*Dwang Contract*). Dalam hal ini pihak yang kedudukannya lebih kuat

¹⁸ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Adidaya Bakti, 1999, hal. 93.

¹⁹ Henry P Pangabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 3.

dapat memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah. Pihak yang lemah disini terpaksa untuk menerimanya karena tidak ada pilihan lain.

Baik dari segi terjadi maupun berlakunya, menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian-perjanjian standar dapat digolongkan pada perjanjian standar umum dan perjanjian standar khusus. Adapun yang dimaksud dari masing-masing perjanjian standar tersebut adalah sebagai berikut :

Yang dinamakan perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur (seperti perjanjian kredit bank) lantas kemudian disodorkan pada debitur. Formil debitur menyetujuinya meteril debitur "terpaksa" menerimanya. Adanya persesuaian kehendak adalah fiktif. Perjanjian standar khusus adalah perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah, seperti akta jual beli model 115672728, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, dilihat dari bentuknya sebagai perjanjian maka seakan-akan disini terdapat unsur konsensualisme padahal sebenarnya sama sekali tidak ada²⁰

2.2.3. Perjanjian Kredit Bank Adalah Perjanjian Baku

Dewasa ini ada kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi dilakukan bukan melalui suatu proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian bisnis itu dilakukan oleh pihak yang satu, yang sebelumnya telah menyiapkan suatu

²⁰⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Op cit.*, hal. 48.

syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah disiapkan terlebih dahulu atau sudah dicetak kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian demikian disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.²¹ Perjanjian baku yang demikian itu dikenal juga dalam transaksi di bidang perbankan, khususnya terkait dengan perjanjian pinjam meminjam uang dikenal dengan perjanjian kredit.

Didalam Praktek perbankan yang penulis ketahui lewat penelitian lapangan, setiap bank telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit ; yang isinya perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah debitur, apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir, seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit, adalah hal-hal yang tidak

²¹ Rony Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap produk tabungan dan deposito (Suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan deposan di Indonesia dewasa ini*, cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 15-26.

mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standar (*standard contract*).²²

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa isi dan bentuk dari perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank, sedangkan pihak pemohon/calon nasabah debitur tinggal menyatakan setuju atau tidak terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fomulir yang disodorkan padanya. Praktek yang demikian ini diikuti pula oleh lembaga-lembaga perkreditan lainnya, diantaranya seperti Bank Pasar. Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian ini calon nasabah debitur pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal, sedangkan ia sangat membutuhkan sekali kredit tersebut guna kelancaran/ kemajuan usahanya.²³

²² Edy putra the' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 32.

²³ *ibid*, hal. 33.

2.2.4. Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun alasannya, perjanjian baku, khususnya perjanjian kredit bank, telah menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Pada praktek perjanjian baku telah menimbulkan kecenderungan terjadi eksploitasi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Di Belanda, tempat KUH. Perdata dibuat untuk mencegah terjadinya eksploitasi pihak kuat kepada pihak lemah dalam perjanjian baku maka Pemerintah Belanda mengaturnya dalam KUH Perdata Baru.

Kedudukan hukum perjanjian tidak lagi sepenuhnya masuk dalam lapangan Hukum Privat. Hukum perjanjian selain berdimensi privat, dalam hal isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, juga berdimensi publik. Untuk melindungi kepentingan masyarakat/konsumen dalam perjanjian baku, harus ada campur tangan pemerintah. Dalam K.U.H. Perdata Baru Belanda, soal perjanjian baku diatur dalam Pasal 6.5.2. dan 6.5.3 yang isinya sebagai berikut :

1. Bidang-bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan.
2. Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui Menteri Kehakiman, melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan undang - undang.
3. Penetapan, perubahan dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan Raja dan Keputusan Raja mengenai hal itu, diletakan dalam Berita Negara.
4. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur

tidak akan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya²⁴

Mengingat keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah. Maka untuk melindungi kepentingan masyarakat luas/konsumen, sudah selayaknya keberadaan perjanjian baku diatur dalam suatu undang-undang, atau setidaknya diawasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengatur masalah perjanjian baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 UU. Perlindungan Konsumen yang isinya sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
 - d. Menyerahkan pemberian kuasa dari konsumen ke pelaku kepada pihak pelaku usaha yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

²⁴ Sudaryatmo, *Op. cit.*, hal. 94.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan, batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyelesaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain melalui regulasi, perlindungan konsumen dalam perjanjian baku juga dapat dilakukan oleh lembaga peradilan. Para Hakim, diharapkan dapat mempergunakan lembaga itikad baik (Pasal 1338 KUH. Perdata), kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1339 KUH. Perdata) serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku. Dan hal yang tidak kalah penting melindungi konsumen dalam perjanjian baku, adalah menegakkan etika profesi konsultan

hukum dan notaris. Bagaimanapun juga, lahirnya perjanjian baku tidak lepas dari andil kunsultan hukum dan notaris. Sudah waktunya, dalam memberikan nasihat kepada kliennya, para konsultan hukum dan notaris, secara moral juga bertanggung jawab untuk memberikan advis dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keadilan.²⁵

UPT-PUSTAK-UNDIP

²⁵ Sudaryatmo, *Op. cit.*, hal. 95.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitik beratkan kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan jalan dilakukan penelitian lapangan, dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan perundangan-undangan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pendekatan empiris dipergunakan, mengingat permasalahan yang diteliti menyangkut faktor sosial kemasyarakatan disamping faktor yuridis.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang diselenggarakan ini adalah termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan atau mengutamakan data primer atau data lapangan¹ Meskipun demikian, guna melengkapi data primer, dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai pelengkap. Bila dilihat dari

¹ Rony Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimenter*, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 121.

segi sifatnya, penelitian ini hendak bermaksud memberikan data seteliti mungkin berkaitan dengan obyek yang akan diteliti serta gejala-gejala lainnya yang terkait dengan hal tersebut.²

3.3. Populasi Dan Metode Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah unit-unit yang terkait dengan materi penelitian tesis ini yang berada di Kota Denpasar, yaitu bank-bank milik pemerintah, Kantor Notaris di Kota Denpasar, dan Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali di Denpasar. Populasi terdiri 5 (lima) Bank Pemerintah, 50 Kantor Notaris, 1 Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Teknik sampling (teknik penarikan sampel) dalam penelitian ini menggunakan purposive non random sampling, yaitu penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, yaitu subyek yang mempunyai ciri-ciri sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, sehingga tidak semua unsur sample mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.³

Berdasarkan penarikan sample dengan menggunakan teknik purposive non random sampling sebagaimana telah diuraikan diatas,

10. ² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*

maka yang dipilih sebagai sample dalam penelitian ini adalah sample yang respresentatif, karena mencerminkan ciri-ciri utama populasi, yaitu :

1. Tiga buah Bank Milik Pemerintah, yaitu :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar
 - b. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Denpasar
 - c. PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Denpasar
2. Enam (6) orang nasabah debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank pemerintah.
3. Dua orang notaris di Kota Denpasar sebagai responden
4. Dua orang pejabat dari Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali di Denpasar.

3.4. Lokasi penelitian

Penelitian tesis dilakukan di Kota Denpasar Bali. Ditetapkannya Denpasar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada faktor efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya yang tersedia. Disamping itu, Denpasar adalah merupakan salah satu kota di Bali yang mempunyai aktifitas tinggi serta sebagai pusat bisnis pariwisata yang cukup prospektif, sehingga memungkinkan didapatkannya data yang diperlukan sesuai dengan materi penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*quistioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *quistioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

3.6. Teknik Analisa Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan memperhatikan atau melakukan perbandingan antara data primer dengan data sekunder, dan selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Premis berfikir yang dipergunakan untuk menganalisa data adalah dari deduktif ke induktif.

Setelah melalui proses analisa, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif analisis. Dari laporan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan komprehensif serta memuat berbagai aspek berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Azas Konsensualisme Sebagai Dasar Pembentukan Perjanjian Kredit Antara Bank dan Nasabah Debitur

Hukum perjanjian mempunyai sejumlah prinsip atau azas yang mendasarinya. Menurut Sudikno Mertokusumo³⁴, ada beberapa azas penting dan di akui oleh para pakar hukum perdata yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian tentang apa saja. Adapun azas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Azas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian baik mengenai bentuk maupun isinya. Azas ini juga disebut di azas otonom yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih di antara mereka. Azas kebebasan berkontrak ini berhubungan dengan isi perjanjian (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHP perdata).
- b. Azas konsensualisme adalah suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian (vide Pasal 1320 ayat (1) KUHP perdata).
- c. Azas kekuatan meningkat/kepastian hukum adalah setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang artinya perjanjian itu dapat dipaksakan bilamana salah satu pihak

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 97.

tidak memenuhi kewajibannya. Azas kekuatan mengikat atau azas kepastian ini berhubungan dengan akibat perjanjian (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata)

Disamping asas-asas di atas menurut M.D. Badruzaman³⁵, ada juga asas :

- a. Asas persamaan hukum adalah menempatkan para pihak dalam persamaan derajat walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, dan lainnya. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus saling hormat menghormati dalam pemenuhan perjanjian.
- b. Asas keseimbangan adalah bahwa kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi namun kreditur dan debitur dibebankan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
- c. Asas moral adalah faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada moral (kesusilaan) sebagai panggilan dari hati nuraninya.
- d. Asas kepatutan adalah asas yang berhubungan dengan isi perjanjian artinya melalui asas ini ukuran adanya hubungan hukum ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Asas kebiasaan adalah asas bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

³⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Edisi I, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1994, hal. 41-44.

Menurut H.P.Panggabean yang mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo semua asas di atas ternyata dapat dikembalikan pada tiga asas :

- a. Yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian yaitu mencakup : asas konsensualisme, asas persamaan hukum, asas keseimbangan dan asas kebiasaan.
- b. Yang berhubungan dengan akibat perjanjian mencakup asas kekuatan mengikat/kepastian hukum, asas moral dan asas kepatutan.
- c. Yang berhubungan dengan isi dari perjanjian adalah mencakup asas kebebasan untuk membuat perjanjian atau otonom³⁶.

Dari sejumlah prinsip atau asas hukum perjanjian tersebut, perhatian dicurahkan pada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip atau tiga asas utama dianggap sebagai soko guru Hukum Perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar Hukum Perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka asas-asas utam tersebut dikatakan sebagai asas atau prinsip dasar³⁷.

Prinsip-prinsip atau azas fundamental yang menguasai Hukum Perjanjian adalah :

³⁶Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 24

³⁷Johanes Ibrahim dan Lindawati Sewa, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, cetakan I, Refika Aditama, 2004, hal. 51

1. Azas Konsensualisme

Berdasarkan azas ini dimana perjanjian dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya perjanjian itu dapat dibuat secara bebas bentuknya, dan dibuat tidak secara formal, melainkan konsensual³⁸.

2. Azas Kekuatan Mengikat

Pada azas kekuatan mengikat ini menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang mereka adakan.

3. Azas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan azas ini, kepada para pihak diperkenankan membuat perjanjian sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki, asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusialaan³⁹.

Bila ini dikaji secara lebih mendalam, bahwa azas konsensualisme menyangkut terjadinya sebuah perjanjian. Azas kekuatan mengikat menyangkut akibat perjanjian, sedangkan azas kebebasan berkontrak terutama berurusan dengan isi perjanjian meskipun diantara ketiga azas tersebut harus dibedakan secara tegas,

³⁸ *Ibid*, hal. 52

³⁹ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995, hal. 74

tetapi untuk memperoleh pengertian yang benar, azas-azas tersebut harus dibahas secara bersama-sama satu sama lain, mengingat ketiga azas tersebut berhubungan erat satu dengan yang lainnya.

Berbicara azas konsensualisme secara khusus dalam kontrak perjanjian, dimana azas tersebut dianut oleh Pasal 1320 K.U.H Perdata. Berdasarkan azas konsensualisme tersebut dimana untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya *consensus* antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan⁴⁰.

Kesepakatan mereka mengikat diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini sering disebut sebagai asas konsensualitas yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung arti kemauan (*will*) para pihak untuk saling mengikat diri, sebab dengan adanya kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian ini akan terpenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggen, manusia terhormat akan memelihara janjinya. Grotius mencari dasar konsensus itu di dalam hukum kodrat, ia mengatakan bahwa *pacta sunt servanda*

⁴⁰ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal.27

promisorum impletorum obligatiom sebagai janji itu mengikat dan kita harus memenuhi janji kita⁴¹.

Prof. Subekti, S.H. mengemukakan bahwa asas konsensualisme harus disimpulkan dari Pasal 1320 dan bukannya dari Pasal 1338 ayat 1 K.U.H Perdata, bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlah perjanjian itu atau perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁴². Dengan demikian, apa yang sudah disepakati oleh pihak-pihak dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1320 K.U.H Perdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Persoalannya sekarang kaitannya dengan perjanjian standar kredit bank adalah menyangkut ada dan tidaknya unsur konsensualisme dalam perjanjian standar. Menyikapi hal ini ada kontroversi pandangan diantara para sarjana (para ahli). Beberapa pakar hukum ada yang menolak kehadiran perjanjian standar (baku). Sebaliknya beberapa pakar hukum ada juga yang menerima perjanjian standar sebagai perjanjian yang mengikat.

Bagi mereka yang mempunyai pandangan menolak perjanjian standar mengemukakan alasan sebagai berikut :

- a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian standar seperti pembentukan undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), karenanya perjanjian standar bukan perjanjian.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal.51.

⁴² Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan VIII, Citra Adytia Bakti, 1989, hal.4

- b. Perjanjian standar (baku) merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*).

Pada suatu perjanjian kredit yang diadakan pihak-pihak tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengadakan *real bargaining* dengan bank (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian standar ini. Perjanjian ini mengandung kelemahan, karena dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kesepakatan (*consensus*) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak, karena pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian kredit bank seperti diuraikan di atas, dikatakan tidak saja mengandung kelemahan tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat 1 K.U.H Perdata⁴³

Dari hal tersebut jelas bahwa dasar berlakunya perjanjian standar kredit itu didasarkan atas “fiksi” dan penerima kredit dianggap menyetujuinya sesungguhnya di dalam kenyataannya ia tidak mengetahui isinya, perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak

⁴³ Edy Putra Tje'Aman, *Op.cit.*, hal. 33.

lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.⁴⁴

Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli. Dalam hal ini diantaranya Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu "*dwangkontrak*" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat 1 K.U.H Perdata sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. Terhadap perbuatan dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter secara material melahirkan "*Legio Particuliere Wetgevers*" (pembentukan undang-undang swasta)⁴⁵.

Stein dalam hal ini juga mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian ini adalah "*de fictive van wil of vertrouwen*". Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pihak-pihak khusus debitur⁴⁶. Prof. Subekti. S.H. mengemukakan bahwa asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 jo 1338 K.U.H Perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang⁴⁷. Prof. Eggens mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak

hal. 1 ⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980,

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Subekti, *Op.cit.*, hal. 30.

di dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan⁴⁸. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar bertentangan baik dengan asas-asas Hukum Perjanjian Pasal 1320 jo 1338 K.U.H Perdata maupun kesusilaan akan tetapi di dalam praktek perjanjian tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan.

Sebaliknya bagi mereka yang menerima kehadiran perjanjian standar sebagai suatu perjanjian mengemukakan alasannya sebagai berikut :

- a. Perjanjian standar (baku) diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat diri pada perjanjian itu.
- b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian standar (baku), maka tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

⁴⁸Enggens dalam Subekti, *Op.cit.*, hal. 31.

- c. Perjanjian standar (baku) mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (*grebuk*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dalam lalu lintas perdagangan⁴⁹.

Dengan adanya dua pandangan yang bertolak belakang tentang perjanjian standar tersebut, maka penulis secara pribadi lebih condong menyetujui pendapat yang terakhir. Secara yuridis formal perjanjian standar sah dan mengikat dengan adanya penandatanganan perjanjian tersebut oleh pihak-pihak penandatanganan atau tanda tangan yang dibubuhkan pada perjanjian standar itu merupakan satu bukti bahwa yang bersangkutan atau pihak-pihak telah menyepakati tentang isi perjanjian itu, atau dengan kata lain disini sudah ada unsur konsensualisme (kesepakatan), sehingga karenanya perjanjian itu mengikat pihak-pihak.

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat diri pada perjanjian itu, jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

⁴⁹Meriam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal. 106.

Asser Rutten mengatakan pula bahwa "Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tangannya, jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Begitu pula bila dikaitkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dasarnya adalah karena adanya unsur penawaran dan penerimaan. Ketika pihak yang satu mengajukan penawaran (baik tertulis maupun tidak tertulis) dan kemudian diterima oleh pihak yang lain (bisa dalam bentuk penandatanganan) perjanjian maka pada saat itu telah terjadi "kata sepakat" (konsensus) diantara pihak-pihak tidak peduli apa yang disepakati itu sesuai dengan hati nurani atau tidak. Apapun alasan yang dapat dikemukakan bahwa tidak seorangpun dalam suatu perjanjian dapat dihalangi untuk dapat bebas memenuhi keinginan dan kebutuhannya, asalkan yang bersangkutan dapat menerima segala persyaratan yang diajukan pihak lainnya sebagai hal yang harus diterima, meskipun disana sini mengandung unsur-unsur yang memberatkan. Hal yang demikian adalah wajar karena posisi tawaran yang tidak sama, diantara pihak-pihak. Disetiap aspek kehidupan manusia, siapapun yang mempunyai posisi tawar yang

lebih kuat, akan lebih dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Ketika paksaan kehendak itu diterima oleh pihak lainnya, maka hal itu sah dan mengikat, karena unsur kesepakatan (konsensus) telah dipenuhi. Dengan adanya penandatanganan oleh debitur atas perjanjian kredit yang ditawarkan oleh bank, maka itu dengan demikian secara yuridis formal debitur telah menyetujui/menyepakati syarat-syarat yang ada dalam perjanjian kredit tersebut.

Konsepsi perbuatan penawaran dan penerimaan dalam suatu perjanjian ini adalah pandangan baru yang dikemukakan oleh J. Van Dunne. Sesuai dengan ajaran umum bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dua pihak (*twuzijdige recrtshandeling*) berdasarkan atas persetujuan persesuaian kehendak. Tetapi pandangan baru ini menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara perbuatan hukum penawaran dan perbuatan hukum penerimaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepihak yaitu penawaran dan penerimaan⁵⁰. Demikian pula pandangan baru ini diterapkan terhadap perjanjian kredit sebagai perjanjian standar, maka pihak yang telah menerima melakukan perbuatan hukum penerima yang akibat hukumnya dapat

⁵⁰Purwahid Patrik, *Persamaan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*, diambil dari J. Van Dunne, *Normatieve Uithg Van Rechtsinhoudingen*, Studentene diete, Kluwer Deventer, 1972, hal. 1-3.

dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebenarnya kenyataan sosial tentang perjanjian kredit sebagai perjanjian standar bukanlah mengenai standarisasi dalam hal hubungan pada umumnya, tetapi hanya mengenai ketidakseimbangan kedudukan diantara pihak-pihak dalam perjanjian yang memerlukan pemikiran-pemikiran untuk diseimbangkan, sehingga memenuhi aspek-aspek keadilan dari sudut pandang kepentingan kedua belah pihak.

Kalangan perbankan dalam memberikan kredit kepada nasabah, telah mempraktekkan standar kontrak. Ketika bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan formulir perjanjian kepada nasabah. Dalam formulir (blanko) tersebut, pihak bank telah menyusun isi perjanjiannya. Pada bagian-bagian tertentu antara lain seperti identitas para pihak, jumlah kredit jangka waktu maupun jenis barang jaminan sengaja dikosongkan untuk diisi. Maksud penyerahan blanko ini, nasabah diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Nasabah umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui ada nasabah yang tidak setuju dengan perjanjian demikian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung.

Memang tidak sedikit nasabah yang belum atau tidak mengetahui hukum perjanjian dan hukum perkreditan, sehingga pada

waktu menandatangani kontrak yang demikian terpaksa menyetujuinya. Dalam pandangan mereka kontrak standar bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara memaksa terhadap pihak yang lainnya, dan karenanya penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensualisme. Kata sepakat atau konsensus sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 K.U.H Perdata dipandang tidak ada, karena kata sepakat/*consensus* diperoleh dengan paksaan.

Pandangan dari pihak bank (berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Purwanto, AK, MBA) asisten Branch manager Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Denpasar, bahwa perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah ia mempelajari isi perjanjian sebagaimana kontrak standar yang disodorkan kepadanya. Disinilah pemohon kredit dan pihak bank telah tercapai kata sepakat baik berdasarkan teori kepercayaan (*vertrouwentheorie*) maupun teori penerimaan (*ontvangstheorie*). Sejak saat itu kedua belah pihak sudah terikat, walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum ditandatangani. Perjanjian kredit secara tertulis hanya merupakan formalitas, berfungsi untuk kepentingan pembuktiaan dan kepentingan administrasi.⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Sri Purwanto, AK, MBA asisten Branch manager Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Denpasar, pada tanggal 19 Agustus 2004

Lahirnya perjanjian kredit tidak tepat bila dikaitkan dengan realisasi tanpa mendasarkan kapan terjadinya kata sepakat para pihak. Pelaksanaan perjanjian tidak selalu terjadi begitu penandatanganan perjanjian selesai. Untuk melihat lahirnya perjanjian harus kembali melihat kapan terjadinya kata sepakat. Jadi menurutnya dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat serta memenuhi unsur konsensualisme (ada kata sepakat) seperti dimaksud Pasal 1320 K.U.H Perdata.

4.2. Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank Milik Pemerintah Sehubungan Dengan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen

Pada setiap perjanjian kredit sebagai perjanjian standar (baku) klausula-klausula yang sudah baku ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank untuk dapat disetujui oleh nasabah debitur. Tidak saja pada perjanjian kredit bank klausula baku ada hampir pada setiap perjanjian standar (baku). Tujuan dibuatnya perjanjian standar (baku) dengan klausula bakunya adalah untuk memberikan kemudahan dari para pihak di dalam mengadakan transaksi. Adapun ciri-ciri dari perjanjian baku dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur.

- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuknya tertulis (berbentuk formulir baku)
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Menurut Sutan Remi Syahdeni, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal perjanjian kredit, maka yang menjadi pemakainya adalah bank) dan pihak yang lain (dalam hal perjanjian kredit pihak yang lain itu adalah nasabah debitur) yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula itu⁵².

Berkaitan dengan perjanjian kredit baku (standar) yang dipakai oleh pihak bank, calon nasabah debitur hanya tinggal memberikan dua alternatif pilihan antara menerima seluruh isi atau klausula-klausula atau menolak (tidak bersedia menerimanya). Seringkali pada kenyataannya calon nasabah debitur menerima seluruh klausula baku itu karena didorong oleh kebutuhan, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang resiko dari penandatanganan perjanjian baku kredit bank tersebut.

⁵²Sutan Reni Syahdeni, *Upaya menanggulangi Kredit Macet*, Makalah yang disajikan pada Seminar Sehari HIBPER (Himpunan Bank Perkreditan Rakyat) Jawa Tengah dan DIY, 15 Mei 1993 di Yogyakarta, hal.8

Adanya unsur pilihan (alternatif pilihan) inilah oleh sementara pihak (termasuk penulis sendiri) perjanjian baku (standar) ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak dan memenuhi unsur konsensualisme (Pasal 1320 jo Pasal 1338 K.U.H Perdata), artinya bagaimanapun juga konsumen (calon nasabah debitur) masih diberi kesempatan atau diberikan hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*) dan karena itu pula perjanjian standar (baku) dikenal pula dengan nama "*take it or leave it contract*"⁵³.

Dalam pandangan banyak pihak tentang perjanjian baku (standar) adalah karena adanya "klausula eksonerasi" (*exoneration clause*) yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada salah satu pihak.

Menurut Purwahid Patrik, syarat eksonerasi (*exoneration*) yang ada dalam perjanjian kredit adalah syarat untuk membebaskan atau melaksanakan perjanjian. Sebaliknya Sutan Remi Syahdeni, menyebut klausula eksonerasi dengan *clause eksemsi* yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang

⁵³Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2000, hal.120.

bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁵⁴

Satu hal yang menjadi bahan sorotan tentang perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku adalah menyangkut klausula bakunya seringkali isinya tidak wajar. Keberatan terhadap klausula baku adalah karena adanya ketidakseimbangan kewajiban prestasi kedua belah pihak. Acapkali dalam perjanjian kredit bank ada klausula yang dari sudut pandang nasabah debitur sebagai sesuatu hal yang tidak adil dan memberatkan. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa klausula perjanjian kredit bank yang dipandang tidak wajar dan tidak sejalan dengan ketentuan pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Adapun klausula perjanjian kredit sebagaimana dimaksud adalah :

a. Klausula perubahan tingkat suku bunga kredit.

Sehubungan dengan tingkat suku bunga kredit yang telah disepakati oleh bank dan nasabah pada umumnya bersifat fluktuatif, maka pihak bank seringkali memperjanjikan hak untuk menyesuaikan besarnya suku bunga kredit dengan mencantumkan klausula tersebut dalam perjanjian kredit yang ditandatangani. Klausula dimaksud umumnya berbunyi kurang lebih sebagai berikut :

⁵⁴ Sutan Remi Syahdeni, *Op.cit.*, h. 11.

“Mengenai besarnya suku bunga, dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur, bank setiap saat secara sepihak berhak melakukan peninjauan penetapan besarnya suku bunga, atau besarnya suku bunga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah apabila ketentuan/peraturan bank menghendaki”.

Dalam perjanjian kredit dari beberapa bank milik pemerintah (Bank Mandiri, BPD, dan BTN) klausula tentang perubahan tingkat suku bunga kredit dimaksud masing-masing sebagai berikut :

Pada Bank Mandiri;

“.... Bank berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan intern bank. Bank akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada debitur atau melalui pengumuman pada setiap kantor cabang setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh bank, pemberitahuan dan pengumuman bank tersebut berlaku dan mengikat debitur”.

Pada Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD);

“Besarnya suku bunga pada ayat (1) pasal ini, sewaktu-waktu dapat diubah oleh pihak bank berdasarkan tarif suku bunga yang berlaku pada bank, yang diberitahukan secara tertulis kepada penerima kredit, dan pemberitahuan tertulis mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan karenanya mengikat penerima kredit”.

Pada Bank BTN;

“Debitur sepakat untuk menyesuaikan tingkat suku bunga berikut besarnya angsuran kredit sebagai akibat perubahan suku bunga dan bank akan memberitahukan penyesuaian tersebut kepada debitur melalui surat pemberitahuan tertulis atau media lainnya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud yang diterbitkan oleh bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini”.

Klausula perjanjian kredit seperti disampaikan di atas adalah tidak adil, karena tindakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak bank. Perubahan tingkat suku bunga kredit untuk kredit yang sedang berjalan sebaiknya atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Disamping tidak adil dan tidak wajar, klausula perjanjian kredit seperti itu bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), yang bunyinya sebagai berikut :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.

Dalam pandangan 2 orang nasabah debitur bank Mandiri, yaitu I Gede Swastika dan Ida Bagus Adnyana Putra. Bahwa klausula penyesuaian tingkat suku bunga kredit seperti diuraikan di atas adalah adil dan layak bila dilakukan secara berimbang, tidak saja ketika suku bunga naik, tetapi juga ketika tingkat suku bunga turun. Penyesuaian tingkat suku bunga kredit tidak hanya diartikan menaikkan saja, tetapi juga dipergunakan untuk menurunkan. Pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian

kredit pihak bank hanya menyesuaikan (menaikkan) yang tingkat suku bunga kredit, dan tidak pernah menurunkan.⁵⁵

Begitu juga dua orang nasabah dari bank Tabungan Negara I Ketut Westra dan Nyoman Sukerti mengemukakan pendapatnya, bahwa klausula penyesuaian tingkat suku bunga seperti dimaksud di atas debitur untuk tunduk kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh bank sehingga debitur kurang mendapat perlindungan, karena suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah. Dari isi klausula tersebut sebaiknya penerapan ketentuan perubahan suku bunga dikenakan kepada debitur baru atau perpanjangan kredit, sedangkan pinjaman yang sudah berjalan tetap dikenakan sesuai ketentuan suku bunga pada saat akad kredit dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan pasal 18 ayat 1 huruf g Undang-Undang No.8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang membuat dan menentukan klausula baku pada setiap perjanjian, apabila menyatakan tunduk konsumen kepada peraturan yang berupa lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Mengingat proses perlindungan konsumen seperti ini membutuhkan waktu untuk bisa diterapkan pada dunia

⁵⁵ Hasil wawancara dengan I Gede Swastika dan Ida Bagus Adnyana Putra sebagai nasabah Bank Mandiri Cabang Denpasar pada tanggal, 18 Agustus 2004

perbankan umumnya, maka perlu dilakukan sosialisasi dan kesamaan pendapat agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik bank maupun peminjam (nasabah)⁵⁶.

Mencermati lebih jauh tentang adanya klausula yang dibuat secara sepihak oleh bank tentang perubahan tingkat suku bunga kredit pada masa kreditur masih memanfaatkan jasa pinjaman, maka dua orang nasabah dari Bank Tabungan Daerah (BPD) Bali, yaitu : I Desak Putu Kerti dan I Nyoman Narwa mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

1. Klausula seperti itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan pihak bank terhadap nasabah debiturnya. Kesewengan ini tampak karena hanya memberikan keuntungan secara sepihak bagi bank saja, tanpa memikirkan atau memperhatikan kepentingan debitur.
2. Penetapan klausula perjanjian yang diikuti dengan kebebasan pihak bank untuk menentukan keputusan yang menguntungkan pihak bank sendiri dan mengikat nasabah, hal ini merugikan pihak debitur, karena disamping jumlah pinjaman beserta bunga yang disertakan menjadi meningkat juga debitur terbeban

⁵⁶ Hasil wawancara dengan I Ketut Westra dan Nyoman Sukerti sebagai nasabah dari bank Tabungan Negara Denpasar tanggal 19 Agustus 2004

memikirkan perkembangan ekonomi secara keseluruhan yang bersifat nasional. Sebab ambruknya perekonomian nasional akan menyebabkan meningkatnya bunga kredit yang akan dibebankan kepadanya.

3. Kesewenangan pihak bank juga nampak dari tidak adanya kemauan baik pihak bank untuk mengenakan bunga yang ideal dan atau mengadakan penyesuaian, apabila perekonomian nasional membaik, tetapi jika tingkat suku bunga menaik secara keseluruhan, hal ini tetap dianggap resiko nasabah sebagai peminjam untuk menerima penyesuaian suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Seharusnya bank menanggung resiko yang sama seandainya hal sebaliknya terjadi, sebab hal ini merupakan bagian resiko yang harus ditanggung bersama.
4. Memperhatikan posisi debitur yang lemah atau tidak menguntungkan seandainya klausula itu tetap diberlakukan, maka sebaiknya pihak bank juga memperhatikan hak-hak debitur, tanpa harus mengkondisikan mereka dalam pilihan yang serba terpaksa. Dengan demikian keterbukaan atau transparansi menuju kearah praktek bank yang sehat atau *prudential banking practice*, telah menjadi tuntutan internasional

yang tidak dapat dihindari oleh kalangan perbankan di Indonesia.⁵⁷

Begitu pula A.A. Darmadipta dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali, dengan berpedoman pada pandangan. J. Satrio mengemukakan pendapatnya, bahwa perubahan suku bunga yang dilakukan secara sepihak harus dilihat dari segi "itikad baik" dan "kepatutan". Pada prinsipnya setiap pihak bebas untuk memperjanjikan tentang bunga, termasuk memperjanjikan kewenangan untuk merubah suku bunga secara sepihak. Namun meskipun demikian, mengingat pelaksanaan perjanjian dibatasi oleh "itikad baik" yang tiada lain adalah "kepatutan", maka perlu kiranya ditinjau apakah adanya janji seperti itu dalam pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan kepatutan.⁵⁸

Selanjutnya Dewa Gde Rudy dari YLKI Bali menegaskan, apapun alasan yang dapat dikemukakan bahwa penyesuaian (perubahan) tingkat suku bunga yang dilakukan pada saat perjanjian kredit masih sedang berlangsung, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Semestinya bila

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Desak Putu Kerti dan I Nyoman Narwa sebagai nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar, tanggal 18 Agustus 2004.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan A.A. Darmadipta dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali, tanggal 4 September 2004.

memperhatikan prinsip keadilan, perubahan tingkat suku bisa saja diperjanjikan, hanya saja berapa besar prosentase perubahan (kenaikannya) harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak antara bank dan nasabah⁵⁹.

Dari sudut pandang kalangan perbankan menyatakan bahwa usaha perbankan merupakan usaha yang cukup beresiko. Bagi dunia perbankan unsur pembentukan bunga tersebut harus jelas perhitungannya, dimana pada pokoknya berapa yang seharusnya dibayar (biaya bunga) kepada para deposan pemilik dana, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus bank tersebut, berapa biaya asuransi atau cadangan penutupan resiko dan sedikit keuntungan yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik bank. Sering kali terjadi karena pengaruh pasar, termasuk pengaruh persaingan antar bank, maka pendapatan bunga tersebut belum dapat menutup biaya-biaya operasional, apalagi menutup resiko atas kegagalan nasabah debitur mengembalikan pinjamannya mempertimbangkan hal-hal seperti itu, maka penempatan klausula "perubahan/penyesuaian suku bunga kredit" pada perjanjian kredit adalah salah satu upaya meminimalisir kerugian bank.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Dewa Gde Rudy dari YLKI Bali, tanggal 4 September 2004.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Gede Arimbawa bagian Marketing Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Legian Denpasar, tanggal 16 Agustus 2004.

Menurut Tri Mulyo Harsono (*Credit Loan Officer*) PT. Bank Mandiri (Persero) Denpasar, bahwa perubahan suku kredit yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank dapat dibenarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1253 K.U.H. Perdata yang menyatakan ; suatu perikatan adalah bersyarat, manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, baik secara menangguhkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Jadi perubahan atas suku bunga kredit dapat terjadi karena adanya peristiwa yang belum pasti yang mungkin dapat terjadi di masa depan, misalnya memperhitungkan inflasi, perubahan suku bunga kredit dari Bank Indonesia. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi perubahan peristiwa tersebut klausul tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikannya⁶¹.

b. Klausula Tentang Percepatan Pelunasan Utang Debitur

Di dalam setiap perjanjian kredit, termasuk perjanjian kredit dari Bank milik pemerintah, terdapat klausula percepatan pelunasan (pembayaran) utang oleh debitur karena pihak debitur tidak menepati janji-janji yang telah disepakati dalam perjanjian.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Tri Mulyo Harsono (*Credit Loan Officer*) PT. Bank Mandiri (Persero) Denpasar, tanggal 2 September 2004.

Klausula dimaksud pada Bank Mandiri, BPD, dan BTN, masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pada Bank Mandiri ;

“Apabila debitur telah lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit konsumtif P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka bank berhak untuk menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh jumlah terhutang harus dibayar oleh debitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama, serta bank dapat melaksanakan haknya atas agunan yang telah diberikan oleh debitur/pemilik agunan kepada bank berdasarkan perjanjian kredit ini”.

Bank BPD ;

“Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian kredit ini, Bank berhak untuk mengakhiri jangka waktu kredit ini, sehingga penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas kredit dan utang-utang lainnya dalam tenggang waktu seperti yang akan ditetapkan dalam surat pemberitahuan bank kepada penerima kredit, apabila menurut pertimbangan bank, penerima kredit ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit sebagaimana mestinya”.

(Pasal 15 Modal Perjanjian Kredit BPD)

Bank BTN ;

“Menyimpang dari perjanjian jangka waktu kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf d, bank berhak mengakhiri jangka waktu kredit tersebut dan dapat untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang debitur kepada bank yang timbul dari perjanjian kredit ini atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan kredit, bila debitur ternyata tidak memenuhi kewajibannya dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan dibawah ini, yaitu :

- a) Debitur wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Perjanjian Kredit ini,

- b) Debitur tidak mungkin lagi atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban didalam Perjanjian Kredit, karena terjadinya antara peristiwa sebagai berikut : Debitur diberhentikan dari Kantor/Instansi yang bersangkutan, dijatuhi hukuman Pidana, mendapat cacat badan sehingga oleh karenanya belum/tidak dapat dipekerjakan lagi, dipindahkan ke kota/daerah lain atau keluar negeri, perusahaan tempat debitur bekerja atau debitur telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar atau telah dikeluarkan perintah oleh pejabat yang berwenang untuk menunjuk wakil atau kuratornya,
- c) Debitur membuat atau menyebabkan atau menyetujui dilakukan atau membiarkan dilakukan suatu tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan, mengurangi nilai atau meniadakannya agunan atau kredit yang telah diterima.
- d) Rumah debitur yang dijadikan agunan kredit telah musnah.
- e) Debitur tidak memperpanjang jangka waktu hak atas tanah yang diagunkan kepada Bank, terhitung 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut,
- f) Keterangan yang diberikan atau hal-hal yang disampaikan atau agunan yang dibuat oleh debitur kepada bank terbukti palsu atau menyesatkan dalam segala segi atau debitur lalai atau gagal untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya kepada bank,
- g) Debitur gagal dalam memenuhi atau debitur bertindak bertentangan dengan suatu peraturan perundangan yang berlaku yang mempunyai akibat penting terhadap atau mempengaruhi hubungan kerjanya dengan kantor tempat bekerja,

Klausula tentang pelunasan utang oleh debitur secara seketika dan sekaligus karena debitur tidak menepati janji-janji dalam perjanjian, harus jelas kriteria atau ukurannya, untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan pihak bank. J. Satrio terkait dengan masalah ini mengemukakan pandangan sebagai berikut :

“Ketentuan ini harus ditafsirkan, bahwa yang dimaksud adalah kalau debitur menyalahi ketentuan perjanjian yang cukup penting, dan bukan setiap pelanggaran memberikan hak kepada kreditur untuk menyatakan kreditnya telah menjadi matang untuk untuk ditagih. Klausula seperti ini, kalau tidak dilaksanakan dengan itikad baik, bisa menimbulkan ketidakpatutan. Bayangkan, kalau sampai kelalaian yang kecil saja ditafsirkan sebagai pelanggaran perjanjian, sekali lagi kita boleh berharap pada pasal 1338 ayat (3) memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan janji seperti itu.”⁶²

c. Klausul Tentang Asuransi Barang Jaminan Kredit.

Klausul tentang asuransi barang jaminan kredit selalu ada pada setiap perjanjian kredit. Kewajiban atau tanggung jawab untuk mengangsuransikan dibebankan kepada nasabah, termasuk membayar premi asuransinya. Klausula asuransi ini pada Bank Mandiri, BPD, dan BTN, masing-masing berbunyi sebagai berikut ;

Pada Bank Mandiri

“Bank hanya terikat pada untuk melakukan pencairan kredit.....setelah syarat-syarat berikut dipenuhi antara lain ; telah dilakukan penutupan asuransi kerugian atas barang (bangunan) agunan kredit dan telah melakukan penutupan asuransi kredit dengan syarat “*Banker's Clause*” untuk kepentingan bank serta dengan jenis, nilai pertanggungan, dan jangka waktu yang disetujui oleh bank, minimal cover note dari perusahaan Asuransi rekanan bank yang menyatakan bahwa bangunan agunan kredit dan jiwa debitur telah ditutup asuransi, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterimanya”.

⁶² J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 43.

Pada Bank BPD ;

- a. "Selama kredit berjalan barang-barang jaminan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh penerima kredit kepada maskapai asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh pihak bank terhadap resiko kerugian yang macam resiko nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak Bank. Di dalam perjanjian asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak maskapai asuransi, maka bank berhak untuk mempertimbangkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban penerima kredit kepada bank (*Banker's Clause*)".
- b. "Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh penerima kredit di bawah penguasaan bank sebelum dilakukan penarikan kredit atau perpanjangan jangka waktu kredit".
- c. "Bila bank memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang jaminan secara langsung, semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, bank berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penerima kredit untuk menutup asuransi atas beban penerima kredit.
(Pasal 10 Modal Perjanjian Kredit BPD)

Pada Bank BTN ;

"Selama jangka waktu kredit atau seluruh utang belum dilunasi ; debitur setuju untuk mengasuransikan barang agunan seperti yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 perjanjian kredit ini dan premi asuransinya menjadi beban debitur sendiri dengan *Banker's Clause* atas nama bank kepada perusahaan asuransi yang ditentukan dan disetujui serta untuk nilai dan jenis resiko kebakaran dan perluasannya (tanah longsor, gempa bumi, banjir) jika dipandang perlu yang ditentukan oleh bank".

4.3. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Bank yang tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan di atas ternyata bahwa rumusan klausula baku perjanjian kredit pada beberapa bank milik pemerintah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen. Dari hal itu perlu dan layak dipersoalkan tentang akibat hukum dari perjanjian kredit yang demikian itu. Permasalahannya, di satu sisi UU Perlindungan Konsumen melalui ketentuan pasal 18 telah mengatur hal-hak yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu klausula baku, sedangkan disisi lain pada beberapa model perjanjian kredit bank pemerintah berjalan tidak sesuai dengan tingkat harapan UU Perlindungan Konsumen.

Guna mengetahui dan membahas tentang akibat hukum perjanjian kredit bank yang tidak memenuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud perlu dibahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata. Menurut Pasal 1320 KUH. Perdata ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dari empat syarat yang ada, dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyaknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶³ Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cukup atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian itu dibatasi dalam waktu 5 tahun (pasal 1454 K.U.H. Perdata) selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat.⁶⁴

Sebaliknya bila syarat objektif tidak dipenuhi (hal tertentu atau sebab yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum (*Null and Void*). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Dengan demikian, pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan

⁶³Mariam Darus Badurlzaman, KUH. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Edisi Kedua, Cetakan I, Alumni Bandung, 1996, h. 98. Lihat juga R. Subekti, *Op. cit.*, h. 17.

⁶⁴Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 222.

hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim dalam hal ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Syarat yang keempat (suatu sebab yang halal) adalah syarat yang paling erat berhubungan dengan masalah yang menyangkut akibat hukum perjanjian kredit bank yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU Perlindungan Konsumen). Suatu sebab yang halal adalah merupakan syarat yang ke empat atau terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. I G. Rai Widjaja memakai istilah "Suatu sebab yang legal" atau "Klausula yang diperbolehkan" atas "Suatu sebab yang halal", guna menghindari terjadinya salah penafsiran atau salah pengertian. Legal artinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau hukum⁶⁵.

Berdasarkan persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (*Geoorloofde Doorzaak*). Yang dijadikan objek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kausa yang legal, sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*). Kausa yang diperbolehkan disini dimaksudkan selain yang dibolehkan berdasarkan undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*Open*

⁶⁵I G. Rai Widjaja, *Merancang suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Edisi Refisi, Cetakan I, Megapoin, Jakarta, 2003, hal. 51

bareorde/Public policy) dan atau kesusilaan (*Zenden/morality*). Sebagai manapula ditegaskan oleh pasal 1337 K.U.H. Perdata yang menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentanga dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan Ketertiban umum.

Menurut Riduan Syahrain "*Undang-undang*" yang dimaksudkan disini adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu semua peraturan yang mengikat kepada masyarakat. "*Kesusilaan*" mempunyai pengertian yang sangat relatif dan tidak sama wujudnya di seluruh dunia, melainkan tergantung kepada sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat dan negara. Demikian juga dengan "*Ketertiban Umum*", sangat relatif, sehingga larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum amat sukar ditetapkan. Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat terinjak-injak, sehingga dikatakan perjanjian itu melanggar ketertiban umum harus dinilai secara kasuistis⁶⁶

Bila suatu perjanjian yang telah memenuhi persayaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah memenuhi ketiga syarat (Sepakat, kecakapan, objek tertentu), tetapi perjanjian itu berkenaan dengan suatu sebab yang tidak dibolehkan, maka perjanjian yang demikian menjadi tidak legal (*illegal*), dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum. Karena tidak dilindungi, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaanya dan akibatnya. Seperti pula telah diatur oleh pasal 1335 K.U.H. Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa

⁶⁶Riduan Syahrain, *Op.cit.*, hal. 221.

sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, pihak yang tidak mematuhi perjanjian atau wanprestasi, tidak dapat dikenakan sanksi hukum.

Dari pemaparan jelas bahwa suatu klausula baku perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Seperti halnya pula telah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum, dan klausula baku perjanjian kredit yang demikian itu menurut ketentuan Pasal 1335 B.W. tidak mempunyai kekuatan hukum.

I Nyoman Sugiarta sebagai seorang praktisi hukum (Notaris) mengemukakan pandangannya bahwa Pasal 18 ayat (1) dari huruf a sampai h merupakan ketentuan hukum yang mengikat wajib dipatuhi oleh pelaku usaha (termasuk pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa perbankan). Klausula perjanjian baku kredit bank yang tidak selaras atau bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum. Bagi pelaku usaha yang membuat klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan

Konsumen dapat dikenakan sanksi, baik sanksi perdata maupun sanksi pidana. Adapun sanksi-sanksi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi Perdata ; perjanjian standar kredit bank yang dibuat oleh pelaku usaha jika digugat di pengadilan oleh konsumen (nasabah), maka hakim membuat putusan deklaratur bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen) pelaku usaha yang pada saat ini telah mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian wajib merevisi untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
- b. Sanksi Pidana : dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen)⁶⁷.

Dalam pandangan I. Gusti Ngurah Mahabuana, Notaris di Denpasar, bahwa kedudukan nasabah dalam perjanjian standar kredit bank sangat lemah serta tidak mempunyai untuk menolak klausula (syarat-syarat) yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh

⁶⁷ Hasil wawancara dengan I Nyoman Sugiarta Notaris di Denpasar, tanggal 23 Juli 2004.

pihak bank. Oleh karenanya memang sangat diperlukan adanya peraturan yang melindungi kepentingan nasabah debitur. Dalam peraturan dimaksud agar diatur tata cara atau pedoman/perumusan klausula baku. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pihak bank ada pedoman atau pegangan dalam perumusan klausula baku perjanjian kredit. Dalam UU Perlindungan Konsumen (Pasal 18 ayat (1)) sudah jelas ada pelarangan pencantuman klausula baku yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Adanya klausula baku perjanjian kredit bank yang tidak sesuai atau bertentangan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut tidak halal (tidak legal) dengan berpedoman pada pendapat Purwahid Patrik, bahwa syarat suatu sebab yang halal mempunyai dua fungsi, yaitu ; tanpa syarat ini perjanjian batal, sebab harus halal, kalau tidak halal (melanggar syarat keempat, sahnya perjanjian), maka perjanjian tersebut batal.⁶⁸

Berdasarkan sistem hukum *common law* juga tidak berbeda unsur-unsur sebuah kontrak atau perjanjian, demi terwujudnya sebuah kontrak yang bisa dilaksanakan ada 4 (empat) persyaratan dasar yang harus dipenuhi, yaitu ; Kesepakatan, Pertimbangan, Kapasitas mengadakan kontrak, dan objek yang sah. Yang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah Mahabuana Notaris di Denpasar, tanggal 23 Juli 2004.

dimaksud objek yang sah, dimana objek kontrak harus sah dan tidak melawan hukum. Kontrak yang diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan obyek yang ilegal, atau kontrak-kontrak yang berlawanan atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah menjadi batal⁶⁹.

⁶⁹Soerdjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (menurut sistem CivilLaw, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional)*, Cetakan I Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 30-31

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit antara nasabah debitur dan bank pemerintah kota Denpasar dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme). Dengan adanya penandatanganan oleh nasabah debitur atas perjanjian kredit yang ditawarkan oleh pihak bank, maka itu berarti nasabah debitur telah menerima tawaran itu dan dengan demikian secara yuridis formal nasabah debitur telah menyetujui atau menyepakati syarat-syarat yang ada dalam perjanjian kredit tersebut.
- b. Rumusan klausula baku (terutama klausula tentang perubahan tingkat suku bunga kredit) pada perjanjian kredit yang telah dibuat bank pemerintah belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999), terutama ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g. rumusan klausula baku tentang perubahan tingkat suku bunga kredit yang dilakukan sepihak oleh pihak bank bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan

bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang membuat dan menentukan klausula baku pada setiap perjanjian, apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- c. Akibat klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf g UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum (*null and void*). Bahkan menurut ketentuan Pasal 1335 K.U.H Perdata, perjanjian kredit bank yang dibuat karena suatu sebab yang terlarang (bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum) tidak mempunyai kekuatan mengikat. Namun secara praktek di lapangan selama penelitian, belum ada nasabah debitur yang merasa keberatan terhadap keberadaan klausula baku tersebut. Ini berarti nasabah debitur menerima akan keberadaan klausula-klausula baku tersebut khususnya perubahan tingkat suku bunga, dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat 12 huruf g perlu dipertimbangkan lagi.

5.2. Saran-saran

Dalam rangka ikut memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat kiranya diberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Guna mencegah tindakan kesewenangan pihak bank dalam menentukan isi perjanjian kredit, maka pihak pemerintah dalam hal ini hendaknya dapat memberikan pengawasan serta melakukan pendaftaran (melakukan seleksi) terhadap rancangan klausula baku perjanjian sebelum disebarluaskan di masyarakat.
- b. Pihak Bank dalam merumuskan klausula baku pada perjanjian kredit hendaknya sesuai dengan kriteria dan pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terhadap klausula baku perjanjian kredit yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar supaya direvisi dan disesuaikan agar tidak diancam batal demi hukum.

BAB VI

RINGKASAN

Bank sebagai lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, fungsi konvensional dari bank adalah disamping menghimpun dana dari masyarakat, juga memberikan pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat. Kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat (nasabah debitur) didasarkan pada suatu perjanjian yang namanya perjanjian kredit.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari ibentuknya pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun secara sepihak tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam bentuk formulir baku. Dengan menggunakan perjanjian baku, maka pelaku usaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Disamping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Didalam praktek pemberian kredit, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan

terlebih dahulu (*standar form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) memuat klausula baku yang isinya tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya.

Fenomena perjanjian kredit bank dengan klausula bakunya menimbulkan persoalan hukum baru dengan diberlakukannya undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) dalam Bab V pasal 18 mengatur antara lain bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku. Pada setiap dokumen dan/atau perjanjian bila (diantaranya) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Dengan adanya ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, membawa implikasi hukum terhadap eksistensi perjanjian kredit bank sebagai perjanjian baku. Berdasarkan pengamatan

dilapangan, ternyata masih ada perjanjian kredit bank dengan klausula bakunya yang tidak sesuai atau belum memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksud. Bahkan masih ada pelaku usaha (bank) yang mencantumkan klausula baku pada perjanjian kredit yang sulit dimengerti, (tidak jelas), dan bahkan ada klausula yang secara nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dari latar belakang masalah seperti itu, maka ada beberapa hal yang ingin dibahas dan diteliti lebih lanjut yaitu, pertama; apakah perjanjian kredit antara nasabah dengan bank pemerintah di Kota Denpasar dibentuk atas dasar konsensualisme. Kedua; apakah rumusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat oleh bank pemerintah sudah memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga; apa akibat hukumnya bila perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula baku tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Didalam membahas pokok-pokok masalah yang akan diteliti dipergunakan teori-teori, azas-azas/prinsip-prinsip hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang relevan, terutama yang menyangkut materi-materi tentang keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian, yang meliputi; pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan kekuatan mengikat perjanjian. Disamping itu dibahas juga tentang perjanjian kredit bank sebagai penyajian baku dalam praktek perbankan, yang

meliputi kajian tentang; pengertian dan fungsi perjanjian kredit, pengertian dan karakteristik perjanjian baku, perjanjian kredit bank adalah perjanjian baku, dan pengaturan perjanjian baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang diselenggarakan ini adalah termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan atau mengutamakan data primer atau data lapangan. Meskipun demikian, guna melengkapi data primer dilakukan pula penelitian kepustakaan memperoleh data sekunder sebagai pelengkap. Bila dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini hendak bermaksud memberikan data seteliti mungkin berkaitan dengan obyek yang akan diteliti serta gejala-gejala lainnya yang terkait dengan hal tersebut.

Teknik sampling (teknik penarikan sampel) dalam penelitian ini menggunakan *purposive non random sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, yaitu subyek yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, sehingga tidak semua unsur sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Berdasarkan penarikan sampel dengan menggunakan teknik *purposive non random sampling* sebagai dimaksud maka yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang representatif, karena mencerminkan ciri-ciri utama populasi.

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar Bali, ditetapkannya Denpasar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada faktor efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya yang tersedia. Disamping itu, Denpasar adalah merupakan salah satu kota di Bali yang mempunyai aktivitas tinggi serta sebagai pusat bisnis pariwisata yang cukup prospektif, sehingga memungkinkan didapatkannya data yang diperlukan sesuai dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank pemerintah dibentuk atas dasar kesepakatan (konsensualisme). Begitu juga tentang rumusan klausula baku pada perjanjian kredit yang dibuat bank pemerintah belum memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian selanjutnya, akibat hukum perjanjian kredit bank yang mencantumkan klausula baku tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum (*Null and void*). Dalam hal demikian secara yuridis dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara pihak-pihak dan perjanjian kredit yang demikian itu menurut hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat. Namun secara praktek di lapangan selama penelitian belum ada nasabah debitur yang merasa keberatan terhadap

keberadaan klausula baku tersebut, ini berarti nasabah debitur menerima akan keberadaan klausula-klausula baku tersebut khususnya peningkatan suku bunga maka dengan demikian ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf g tersebut perlu dipertimbangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/ Makalah/ Majalah

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1982.
- Edy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan Suatu tinjauan Yuridis*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1989.
- Felix O. Subagio, *Perkembangan Azas-Azas Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan Ilmiah "Perkembangan Hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis Di Indonesia". Badan Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 18-19 Pebruari 1993.
- Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.
- I.G.Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, edisi Revisi, Cetakan I, Megapoin, Jakarta, 2003.
- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewa, *Hukum Bisnis Dalam Manusia Modern*, Cetakan I, Refika Aditama, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1995.
- Marhaynis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1980.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980.
- *Perjanjian Kredit*, Alumni Bandung, 1983
- *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
- *KUH. Perdata Buku III Hukum Perkatan Dengan Penjelasan*, Cetakan I, Edisi Kedua, Alumni 1996.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Rony Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Poduk Tabungan Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 1985.
- Rudy Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, 1984.
- Sri Gambir Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Makamah Agung*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1999.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, P.T. Intermesa, Jakarta, 1979
- , *Aneka Perjanjian*, Cetakan IX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2000.

Soerdjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek dagang International)*.

Sutan Reny Syahdeni, *Upaya menggulangi Kredit Macet*, Maklah yang disajikan pada seminar sehari HIBPER (Himpunan Bank Perkreditan Rakyat) Jawa Tengah dan D.I.Y, 15 Mei 1993 di Yogyakarta.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Subekti R, *Jamiman-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, P.T Citra Adtya Bakti, Bandung, 1991.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek).